



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Ristekdikti RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Januari 2017.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016; 2. Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016; 3. Realisasi Target Kinerja Dibandingkan dengan RKP Tahun 2016; 4. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017; dan 5. Permasalahan dan Antisipasi APBN TA 2017.
Hadir	: 42 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Mohamad Nasir/Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.20 WIB oleh Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

Komisi X DPR RI dan Menristekdikti RI sepakat akan melakukan **Raker lanjutan pada tgl. 24 atau 25 Januari 2017 (tentatif)**. Untuk itu Kemenristekdikti RI diminta menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, 2 (dua) hari sebelum Raker berlangsung, antara lain:

1. Finalisasi perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti RI tahun 2016.
2. Langkah-langkah strategis agar realisasi kinerja TA 2016 yang di bawah target RKP tidak terulang pada TA 2017, seperti: jumlah mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), jumlah revitalisasi sarpras lembaga litbang dan PTN, dan jumlah kerjasama Litbang PT bekerjasama dengan industri dan lembaga litbang.
3. Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi seperti program hibah ke PTS, sarpras PTN, alokasi anggaran untuk kreativitas mahasiswa, kepangkatan dosen, pemilihan rektor dan pemilihan pejabat di lingkungan Dikti, kerjasama dengan lembaga dan/atau dosen/profesor dari luar negeri, wacana akan mendatangkan profesor dari luar negeri, dan prodi yang langka peminat.
4. Hasil rewiu BPKP terhadap anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 350 M yang terdiri dari revitalisasi pendidikan vokasi (Rp 200 M), penambahan BOPTN (100 M), dan *World Class Professor* (Rp 50 M) yang masih di blokir oleh Kementerian Keuangan.
5. Pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
6. Implementasi pelaksanaan amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Dikti utamanya terhadap Akademi Komunitas.
7. Persiapan dan kesiapan implementasi pelaksanaan amanat UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran utamanya terhadap Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP).
8. Langkah-langkah yang telah dan yang belum dilakukan terhadap rekomendasi Panja BOPTN Komisi X DPR RI, dan Panja Beasiswa dan SM3T Dikti Komisi X DPR RI.
9. Menyampaikan data-data seperti: data pendidikan tinggi per 31 Desember 2016, dana luncuran, dan RKA-K/L Tahun 2017 Kemenristekdikti RI.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **13.40** WIB

MENTERI RISTEKDIKTI RI



MOHAMAD NASIR

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M.